

**ANALISIS SENGKETA PAJAK ATAS PEMBEBANAN PAJAK
PENGHASILAN TENAGA KERJA *OUTSOURCING* (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2201/B/PK/PJK/2020)**

ABSTRAK

JESSICA CLARISSA

203311042004

Outsourcing seharusnya dibayar dan dilapor oleh Penyedia Jasa bukan Pengguna Jasa. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2201/B/PK/Pjk/2020 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi pemeriksaan Tenaga Kerja Harian lepas sejumlah Rp10.707.633.050,00 oleh karena Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya tenaga kerja harian lepas hanya semata-mata membandingkan (equalisasi) jumlah biaya-biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam laporan keuangan dengan pelaporan dalam SPT PPh Pasal 21 Pemohon Banding dan mengenakan tarif sebesar 5%. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak melaporkan biaya tenaga kerja harian lepas tersebut dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 semata-mata bukan karena kesengajaan atau kelalaian namun dikarenakan ketidakpahaman pemohon banding. Dalam kasus tersebut, pemeriksa mengoreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 atas tenaga kerja lepas *Outsourcing*. Dimana atas jasa tersebut Wajib Pajak telah melakukan penyetoran PPh Pasal 23, namun Wajib Pajak bersedia memperhitungkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 atas tenaga kerja harian lepas *Outsourcing*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Peninjauan Kembali antara Direktur Jendral Pajak selaku Pemohon dan PT. Indal Aluminium Industry Tbk. selaku Termohon dimenangkan oleh PT. Indal Aluminium Industry Tbk. karena setelah Hakim meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Direktur Jendral Pajak selaku Pemohon Peninjauan Kembali dan PT. Indal Aluminium Industry Tbk. Hukum pajak material adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang menjadi syarat untuk dapat dikenai pajak atau menjadi objek pajak (syarat tatbestand pajak) pajak formil merupakan sekumpulan peraturan yang memuat tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan a quo karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memotong dan memungut serta menyetorkan PPh Pasal 21 dengan menghitung jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pemohon Banding

Kata Kunci: *outsourcing*, pajak penghasilan

**ANALISIS SENGKETA PAJAK ATAS PEMBEBANAN PAJAK
PENGHASILAN TENAGA KERJA OUTSOURCING (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2201/B/PK/PJK/2020)**

ABSTRACT

JESSICA CLARISSA

203311042004

Outsourcing should be paid for and reported by the Service Provider not the Service User. In the decision of the Supreme Court Number 2201/B/PK/Pjk/2020 that the Appellant does not agree with the correction of the examination of casual daily workers in the amount of Rp. (equalization) the amount of labor-related costs in the financial statements with the reporting in the SPT PPh Article 21 of the Appellant and imposes a rate of 5%. In this case, the Appellant does not report the daily casual labor costs in the reporting of the Article 21 Income Tax Return solely not because of intentional or negligence but due to the misunderstanding of the appeal applicant. In that case, the examiner corrects the Article 21 Income Tax Imposition Base on Outsourcing freelancers. Where for these services, the Taxpayer has deposited Article 23 Income Tax, but the Taxpayer is willing to calculate the Article 21 Income Tax for daily labor outsourced. This study uses a juridical-normative research method. Review between the Director General of Taxes as the Petitioner and PT. Indal Aluminum Industry Tbk. as the Respondent was won by PT. Indal Aluminum Industry Tbk. because after the Judge examined and re-examined the arguments put forward in the Memorandum of Review by the Director General of Taxes as the Petitioner for Judicial Review and PT. Indal Aluminum Industry Tbk. Material tax law is legislation that regulates conditions, actions, legal events that are a requirement to be subject to tax or become a tax object (requirements for tax administration). Formal tax is a set of regulations that contain procedures for making material law a reality. The Panel of Supreme Court Justices is of the opinion to reaffirm the a quo decision because the Appellant for Appeal now the Respondent for Review has withheld and collected and deposited Income Tax Article 21 by calculating the amount of the Tax Imposition Basis for the Appellant.

Key Words: outsourcing; income tax